

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN
JUDEX FACTIE MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN
HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

AL – ARTHUR EVAN ADI NUGRAHA

NIM. E0014015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT
KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPAJAKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016)**


Oleh

**Al – Arthur Evan Adi Nugraha
NIM. E0014015**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 17 JULI 2018

Dosen Pembimbing


EDY HERDYANTO .S.H., M.H
NIP. 195706291985031002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
KESALAHAN *JUDEX FACTIE* MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT
KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628
K/Pid.Sus/2016)**

Disusun Oleh :
Al-Arthur Evan Adi Nugraha
NIM. E0014015

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 30 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

1. **Kristivadi, S.H., M.Hum** :
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H** :
NIP. 196107211988032001
Sekretaris
3. **Edy Herdvanto, S.H., M.H** :
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Al – Arthur Evan Adi Nugraha
NIM : E0014015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN *JUDEX FACTIE* MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Al – Arthur Evan Adi Nugraha
NIM. E0014015

ABSTRAK

AL-ARTHUR EVAN ADI NUGRAHA. E00140015. ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2628 K/Pid.Sus/2016).

Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana perpajakan tentang faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan sebuah faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau apabila diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling berhubungan untuk ditarik konklusi

Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Serta memutuskan Terdakwa bersalah telah membuat faktur pajak fiktif dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to find out the Cassation of the Public Prosecutor against the negligence of the Panel of Judges in applying the statutory rules based on the law applicable in the criminal act of taxation on fictitious tax invoice. A fictitious tax invoice is an invoice that is issued not based on actual transactions, or if it is issued by an unconfirmed entrepreneur as a Taxable Person for VAT purposes.

The research method used is legal research is prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of literature / document studies, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking, from the filing of the major premise and the minor premise are interconnected to be drawn conclusion

The result of this research, it is known that the reason for filing the Cassation lawsuit by the Public Prosecutor has been appropriate, and knowing that the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor on the grounds that the South Jakarta District Court did not apply the law or did not implement it properly and knew that the Supreme Court the decision of the South Jakarta District Court and to adjudicate the case in accordance with Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. And decided the defendant was guilty of making fictitious tax invoice and obliged to account for his actions in accordance with Article 193 paragraph (1) KUHP.

Keywords: Cassation, Fictitious Tax Invoice, Tax Criminal Act

MOTTO

“Innallaha ma's sabireen”

(Al - Qur'an 8:46)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Al – Insyirah : 6)

“Bertanggung jawablah atas apa yang telah kamu lakukan dan hadapi itu dengan tegar”

(Dhany Koesworo)

“Untuk mendapat sesuatu yang kita inginkan haruslah menikmati setiap proses yang akan membawamu kehasil yang kau inginkan”

(Andiko Purwandono)

“No Sacrifes No Victory”

(Al – Athur Evan Adi Nugraha)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.
2. Ayah saya Dhany Koesworo, S.H yang selalu menjadi motivator saya dalam mengerjakan skripsi saat tidak tahu harus menulis apa.
3. Ibu saya Endang Wahyuningsih dan adik saya Valda Aulia Az-Zahra yang selalu mendukung saya tanpa henti dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat saya *Babermania Magelang* yang senantiasa mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat saya *Expandables* yang selalu menemani saat mengerjakan skripsi di Solo.
6. Sahabat saya *Kontrakan MBS Semarang, Kontrakan Tempuran* yang telah memberikan saya tempat untuk mendapatkan ide ide untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Teman saya, sahabat saya, saudara saya alm. Hendri Gusti Nugraha terima kasih atas segala kenangannya semoga tenang di alam sana.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2014.
9. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME. Atas limpahan karunia, berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016)**. Argumentasi terhadap alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ini membahas tentang diabaikannya alat bukti dan fakta hukum dalam persidangan mengakibatkan terdakwa bebas dari Tindak Pidana Perpajakan serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasus Tindak Pidana Perpajakan tersebut. Oleh karena itu, dengan ikhlas dan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.**
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan izin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu dan ide, juga memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, SH. MHum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena hal tersebut penulis memohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil karya Penulisan Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan kontribusi yang positif pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 17 Juli 2018

Penulis

Al – Arthur Evan Adi Nugraha
NIM. E0014015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi	14
a. Pengertian Kasasi.....	14
b. Tujuan Kasasi	15
c. Alasan Pengajuan Kasasi	16
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum.....	16
a. Pengertian Penuntut Umum	16
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	17
3. Tinjauan tentang Judex Factie	18
a. Kewenangan Pengadilan Negeri.....	18
b. Kewenangan Pengadilan Tinggi	20
4. Tinjauan tentang Putusan Bebas.....	21
a. Pengertian Putusan Bebas.....	21
5. Tinjauan tentang Terdakwa	24

a. Pengertian Terdakwa	24
b. Hak-hak Terdakwa.....	24
6. Tinjauan tentang Pembuktian Dan Alat Bukti.....	25
a. Pengertian Pembuktian	25
b. Prinsip-prinsip Pembuktian	26
c. System Pembuktian	26
d. Pengertian Alat Bukti	28
e. Jenis Alat Bukti	28
7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perpajakan	32
a. Ketentuan Kriteria Pelanggaran.....	33
B. Kerangka Pemikiran	39
1. Gagasan Kerangka Pemikiran.....	39
2. Keterangan.	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Identitas Terdakwa	41
2. Uraian Fakta Peristiwa	41
3. Surat Dakwaan	42
4. Tuntutan Penuntut Umum	53
5. Putusan Pengadilan Negeri.....	71
6. Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum	71
7. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	74
8. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016.....	77
Pembahasan.....	94
1. Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan <i>Judex Factie</i> Membebaskan Terdakwa Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP <i>jo</i> Pasal 253 ayat (1) KUHP	94
2. Kesesuaian Pertimbangan <i>Judex Juris</i> Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan telah Sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHP <i>jo</i> Pasal 193 ayat (1) KUHP.....	103
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Simpulan	110

B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan (Romli Atmasasmita, 2004 : 39). Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.” Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka

dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Dengan menganut sistem *self assesment* tersebut khususnya bertujuan untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara Aparatur Pajak dengan Wajib Pajak, menjaga keseimbangan penerima pajak sebagai tulang punggung penerimaan APBN dan membangun citra institusi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik (Suisno 2016).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya penerimaan pajak disektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%. Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi

penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang pajak kepada kas Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Jakarta Selatan, tersangka DP merupakan pemilik perusahaan bidang barang dan jasa dengan nama PT Virora Cipta Indonusa , perkara ini bermula tersangka DP pada 2012 dan 2013 melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang telah direkayasa olehnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, adapun DP dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan kerugian negara pada tahun 2012 sebesar 2M dan pada tahun 2013 sebesar 15,8M dituturkan oleh Kasi penerangan Hukum Kejaksaan Jakarta Selatan . Dan juga terjadi kasus lain, terdakwa kasus penggelapan pajak, Djoko Pranggono Direktur PT Virora Cipta Indonesia dihukum pidana maksimal dua tahun setelah didakwa melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dan d , Huruf i jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dalam kasus ini didakwa subsidair, diketahui bahwa terdakwa

dituntut secara terpisah, bahwa bersama sama telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada 2012 sampai 2013 di kantor Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, didakwa melakukan tindak pidana dengan tindakan menyampaikan surat pemberitahuan SPT PPN dan menyampaikan surat yang isinya tidak benar, sehingga telah merugikan Negara sekitar Rp17,8 miliar.

Namun dengan sedemikian banyaknya alat bukti yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena menyatakan tidak sependapat dengan putusan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 (putusan aquo) dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan *Judex Factie* tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui putusan Mahkamah Agung nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Mei 2016.menyatakan terdakwa Djoko Pranggono secara sah dan meyakinkan bersalah'dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut". Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp. 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) =

Rp.53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika tidak mencukupi maka terdakwa dipidana dengan pidana kurungan 8 (delapan) bulan.

Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sehingga untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara atau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik Pegawai Negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di atur dalam Pasal 44 ayat (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Sehingga untuk memberi

efek jera pada pelakunya dan sehingga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan uraian, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau disebut skripsi dengan memilih judul : **“ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA AKIBAT KESALAHAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 2628 K/pid.Sus/2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan *Judex Factie* membebaskan terdakwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 253 ayat (1) KUHAP?
2. Apakah pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan telah sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai oleh penulis. Ada dua macam tujuan penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Objektif

- 1) Mengetahui kesesuaian pertimbangan *Judex Factie* membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi .Penuntut Umum dan kesesuaian menjatuhkan hukuman dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Tujuan Subjektif

- 1) Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, serta pemahaman dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut pengajuan kasasi *judex facti* salah menerapkan hukum.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan menerapkan ilmu serta teori-teori yang telah penulis dapatkan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya juga bagi masyarakat pada umumnya.
- 3) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan mempunyai suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil bukan hanya bagi penulis tetapi juga untuk banyak pihak. Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis . Adapun manfaat tersebut, antara lain:

1 Manfaat Teoretis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pembuktian pidana, khususnya berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim

menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyelundupan manusia.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membantu memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, juga untuk berbagai pihak yang memiliki minat dan tertarik pada permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengeahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

Penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya akan menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud marzuki, 2014:59). Artinya, sebagai ilmu preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*), bukan perilaku (*behaviour*), individu dengan norma hukum (Marzuki, 2014: 41). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian terdapat beberapa

pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapati informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2013: 133).

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (Marzuki, 2013: 134).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2014: 141). Adapun, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - 4;

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013: 181). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Artikel;
- 4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen laporan, arsip

hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014;21).

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode selogisme yang bersifat deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari premis mayor yang berisi tentang aturan hukum yang mengatur tentang aturan terkait dan premis yang berisi fakta hukum, kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) (Marzuki, 2013: 89-90).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum dilakukan guna memberikan gambaran, enjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab terbagi dari beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang kasasi, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dan keputusan, tinjauan tentang pembuktian dan alat bukti,

tinjauan tentang penuntut umum tinjauan tentang tindak pidana perpajakan secara berlanjut.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu:

- A. Apakah argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan *Judex Factie* membebaskan terdakwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP?
- B. Apakah pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan argumentasi Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir yang memberikan putusan terhadap pengadilan-pengadilan di tingkat dibawahnya dan para Hakim yang memberikan putusan yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan Terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958 *jo.* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir (J.C.T Simorangkir, dkk. 2000: 81). Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang terakhir. Pada KUHAP upaya hukum ini diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai dengan

Pasal 258. Ketentuan Pasal 244 KUHP, yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 terdapat frasa ‘pengecualian putusan bebas’ dapat dimintakan upaya hukum Kasasi.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010: 537).

b. Tujuan Kasasi

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang- Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Tujuan utama upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut:

1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut peraturan Undang-Undang;

2) Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adakalanya tindakan koreksi sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus”, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain pemeriksaan kasasi yaitu untuk mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum. dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum (M. Yahya Harahap, 2010: 539-542).

c. Alasan Pengajuan Kasasi

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Tinjauan tentang Penuntut Umum

a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Apabila Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dapat disimpulkan tugas jaksa adalah:

- 1) Sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan pengadilan;
- 2) Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntut umum mempunyai wewenang:
 - a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
 - d) Membuat surat dakwaan;
 - e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g) Melakukan penuntutan;
 - h) Menutup perkara demi kepentingan umum;
 - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j) Melaksanakan penetapan hakim.

3. Tinjauan tentang *Judex Factie*

Judex factie dan *judex jurist* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex factie*, yaitu berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut karena Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

a. Pengadilan Negeri

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak memberikan apa yang disebut dengan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 menyebutkan, bahwa: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Begitu pula dalam Pasal 6 disebutkan: Pengadilan terdiri dari: Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding”.

Kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri yang pertama kali menangani pidana maupun perkara perdata dimuka sidang pengadilan. Mengenai dibentuknya Pengadilan Negeri, hal ini dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa usul pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,

Sekretaris dan Jurusita. Yang disebut sebagai pimpinan adalah seorang Ketua dan Wakil Ketua.

Mengenai wewenang Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 84,85,86 KUHAP.

1) Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa:

- a) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- b) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- c) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- d) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

2) Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman u ntuk

menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

- 3) Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa: “Apabila seorang melakukan tindak pidana di Luar Negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya”.

b. Pengadilan Tinggi

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum menyebutkan: Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa disimpulkan sebagai berikut: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili baik perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat banding yakni mengadili kembali sesuatu perkara pidana maupun perkara perdata, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Selain itu Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris.

Mengenai wewenang Pengadilan Tinggi juga telah diatur dalam Pasal 87 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

4. Tinjauan tentang Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbuhtinya menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut , putusan bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. (M.Yahya Harahap, 2005 : 348)

Putusan bebas ditinjau dari asas pembuktian Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :

a. Asas minimum pembuktian

Asas bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah

b. Asas pembuktian secara negatif

Dalam undang undang disebutkan asas pembuktian secara negatif yang menyebutkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan Terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP , maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat Hakim bahwa :

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan ahli, keterangan saksi, surat , dan petunjuk, serta pengakuan Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa artinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian Hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai.
- b) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal lini, selain tidak memebuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan

Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum. (M.Yahya Harahap, 2005 : 348)

5. Tinjauan tentang Terdakwa

Pengertian terdakwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa adalah perubahan status dari tersangka yang mengalami proses peradilan di pengadilan. Untuk ditetapkan sebagai terdakwa, harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain orang yang menyandang predikat sebagai Terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

KUHAP mengatur beberapa hak yang dimiliki oleh Terdakwa. Seperti yang disebutkan Pasal 50 ayat (3) mengatur bahwa “Terdakwa berhak diadili di Pengadilan”. Kemudian Pasal 51 huruf b menjamin bahwa Terdakwa engetahui dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti olehnya tentang apa yang didangkakan kepadanya. Berikut adalah hak hak yang dimiliki oleh Terdakwa :

- a. Hak segera diadili oleh Pengadilan.
- b. Hak memberikan keterangan s.ecara bebas kepada Hakim.
- c. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam pemeriksaan di pengadilan.

- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- e. Hak terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan.
- f. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhanannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama seperti yang sudah disebut.
- g. Hak Terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari Rohaniawan.
- h. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*.
- i. Hak untuk mengajukan Banding , Kasasi dan melakukan Peninjauan Kembali.
- j. Hak untuk mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

6. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 ; 273)

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum

acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan dengan prosedur yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Pembuktian bersal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” dimana keseluruhan mempunyai arti yaitu cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2004 : 230). Dengan kata lain pembuktian sangat penting kedudukannya dalam proses hukum acara pidana dan oleh karena itu haruslah dikuasai oleh semua aparat penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan, khususnya Penuntut Umum yang mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa.

b. Prinsip – Prinsip Pembuktian

Dalam pembuktian hukum pidana dikenal beberapa prinsip, antara lain :

- 1) Menjadi saksi adalah kewajiban, yang dapat dilihat didalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP
- 3) Satu saksi bukanlah saksi, yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP
- 4) Keterangan Terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri, yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP

c. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara menerapkan hasil pembuktian terhadap suatu perkara yang

diperiksa. Maka dari itu pembuktian harus dilandaskan pada teori-teori sebagai berikut :

- 1) Teori pembuktian berdasarkan Undang – Undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang sah, dikenal sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan.

- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka (*Convintion In Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” Hakim. Keyakinan bisa diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil dari suatu pemeriksaan itu diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa. Kelemahan dari sistem ini adalah besar keyakinan Hakim tanpa didasari dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecendurengan Hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti (M. Yahya Harahap, 2006 : 277)

- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*convintion raisonee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*convintion raisonee*). Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya,

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dengan kata lain, menurut sistem ini keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan tidaknya Terdakwa (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2004 : 235)

4) Sistem pembuktian berdasarkan Undang – Undang secara Negatif (*Negatif Wettlijk Bewijk Theory*)

Dalam teori ini, putusan Hakim didasarkan pada pembuktian yang dilakukan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan sah, serta ditambah dengan keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut bisa dikatakan sistem menurut Undang-Undang positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka.

d. Pengertian tentang Alat bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah (Leden Marpaung, 1992: 23-24) adalah:

1) Keterangan Saksi;

- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2) Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3) Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari

keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem elektronik, khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk.

5) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Leden Marpaung, 1992: 25).

7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, 2013 : 6). Berdasarkan pengertian diatas bahwa pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sehingga bisa menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi Penerimaan sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

Pajak dikenakan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan maka Negara mengatur melalui regulasi atau aturan tentang pajak. Pengaturan tentang perpajakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Unndang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

a. Ketentuan kriteria pelanggaran juga diatur di dalamnya pada Pasal 39 ayat (1) ;

- 1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Penyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajin Pajak.
- 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- 5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- 6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- 7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.

- 8) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11)
- 9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan menyangkut tindakan administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana serta yang dimaksud dengan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A bukan merupakan pelanggaran melainkan tindak pidana di bidang perpajakan (Diajeng Kusuma Ningrum 1016)

Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Suatu Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, ditagih dengan Surat Paksa.

a. Surat Teguran

Surat Teguran diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

b. Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

c. Pengumuman di Media Massa hukum

Karena Surat Paksa berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial, pengumuman di media massa bertujuan untuk memberitahukan kepada publik adanya hak mendahului negara atas asset penanggung pajak untuk pelunasan utang pajak serta untuk melindungi public dari kerugian yang lebih besar karena melakukan transaksi atau perikatan dengan penanggung pajak setelah terbitnya Surat Paksa.

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

SPMP diterbitkan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

e. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang dilaksanakan apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar.

f. Lelang

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka Pejabat segera melaksanakan lelang.

g. Pencegahan

Sesuai UU PPSP, terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak dapat dilakukan pencegahan.

h. Penyanderaan

Menurut Pasal 1 angka 21 UU PPSP, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa

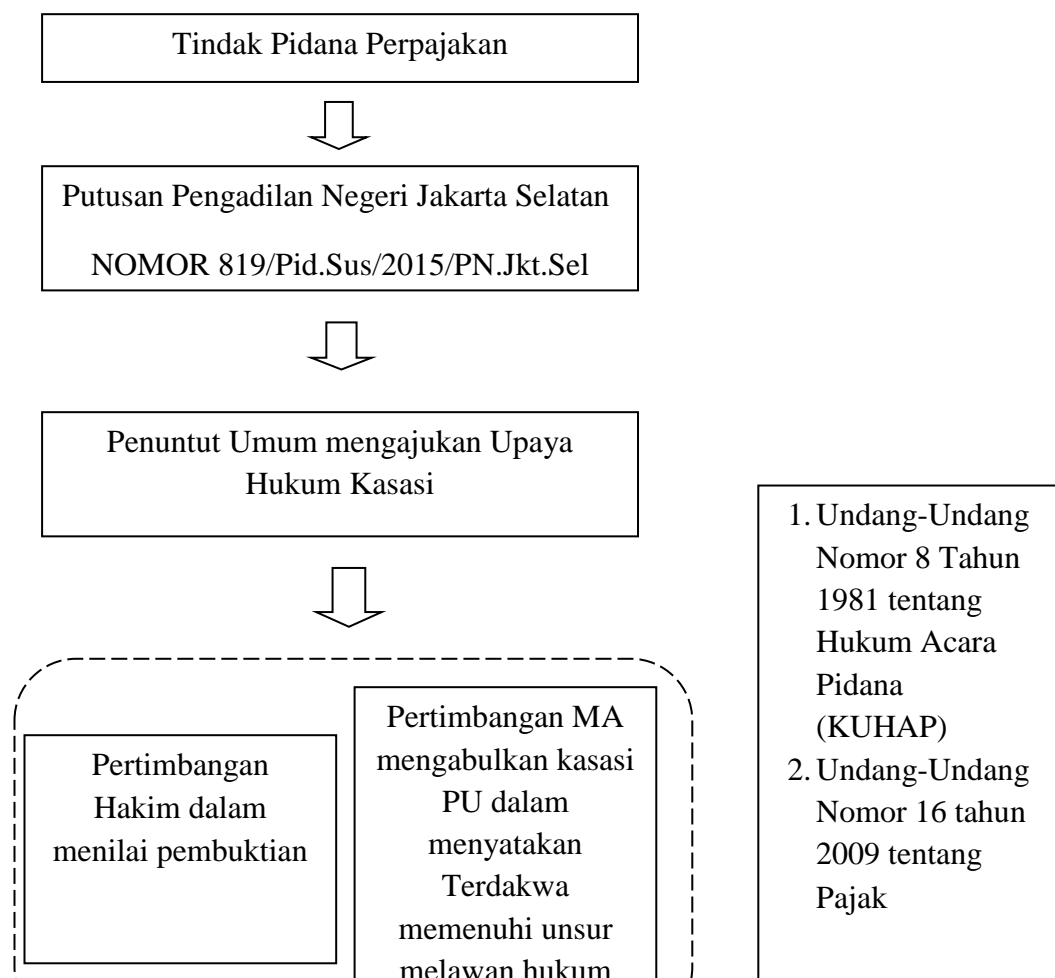
diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Penanggung Pajak yang disandera lepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

B. Kerangka Pemikiran





Putusan Mahkamah Agung Nomor
2628 K/Pid.Sus/2016

Keterangan:

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur penulis dalam menganalisis, menjabarkan, serta menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang dikaji yaitu tentang pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara Tindak Pidana Pajak yang dilakukan oleh Terdakwa Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan. Secara garis besarnya, Putusan Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 yang memutuskan Terdakwa terbukti bersalah. Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana pajak yaitu, telah memalsukan laporan pajak SPT untuk mengurangi pajaknya dan menggunakan identitas palsu saat mendaftarkan SPT yang telah di rekayasa olehnya yang berakibat merugikan pendapatan negara dari sebagaimana mestinya yang didapatkan. Akan tetapi, pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa bebas dari dakwaan primair oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel . Karena dirasa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Penuntut Umum melakukan

upaya hukum Kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung dan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menghakimi sendiri perkara tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penullis telah melakukan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2628 K/Pid.Sus/2016 dalam perkara meyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN
Tempat lahir	: Magelang
Umur/Tanggal lahir	: 64 tahun / 09 Mei 1950

Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan H.Rosyid Nomor 27 A, RT.002, RW.001, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

2. Uraian Fakta Peristiwa

Pada tahun 2012 Terdakwa Djoko Prianggono mendapat perintah dari Herry Prabowo untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas yang di palsukan. Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan menggunakan nama Andry Kurniawan. Setelah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut Terdakwa pergi ke Notaris Nuraini Yusuf untuk membuat akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa tanggal 18 Mei 2012. Setelah itu Terdakwa pergi ke KPP Pratama Kebun Jeruk untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah mendaftarkan PT. Virora Cipta Indonusa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 03.101.618.1-017.000 pada 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 pada tanggal 29 Mei 2012. Pada tahun 2012 PT. Virora Cipta Indonusa dengan Komisaris Terdakwa melaporkan SPT masa PPN 2012 yang telah dimanipulasi olehnya. Kemudian pada tahun 2013 PT. Virora Cipta Indonusa dengan Komisaris Terdakwa melaporkan SPT masa PPN 2013 yang juga telah di manipulasi olehnya. Sebenarnya PT. Virora Cipta Indonusa di bentuk untuk mengurangi Kewajiban dari Perusahaan lain. Dan kegiatan dagang dari PT. Virora Cipta

Indonusa adalah fiktif. Pada tahun 2012 PT. Virora Cipta Indonusa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.449.521.938,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pada tahun 2013 kerugian negara mencapai Rp 14.513.284.718,00 (empat belas miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Total jumlah kerugian keuangan negara yang di sebabkan oleh PT. Virora Cipta Indonusa atas laporan SPT masa PPN fiktif sebesar RP 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

3. Surat Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 2012 sampai pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan *sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negar, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing*

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 dan di dalam akta tersebut tertulis direktur Agus Handoyo dan Komisaris adalah ANDRY KURNIAWAN dengan modal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh Agus Handoyo sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Bahwa pada saat pembuatan akta perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRY KURNIAWAN dimana pada KTP tersebut ditempelkan photo Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. Herry Prabowo. Selanjtnya Terdakwa atas perintah Sdr. Herry Prabowo pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang dengan diantar oleh Sdr. Arifin untuk pembuatan akta. Selanjutnya di kantor Notaris tersebut atas perintah dari Sdr. Herry Prabowo Terdakwa menandatangani akta pendirian perusahaan PT. Virora Acipti Indonusa dan saat menerima KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN dan menandatangani akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa photo dalam KTP tersebut benar dirinya akan tetapi namanya bukan nama Terdakwa sebenarnya yakni DJOKO PRIANGGONO melainkan atas nama ANDRY KURNIAWAN. Selanjutnya KTP atas nama ANDRY KURNIAWA dan ata pendirian PT.. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa ke KPP Pratama Kebun Jeruk Satu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk satu menerbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) PT.Virora Cipta Indonusa adalah 03.101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 19 Mei 2012, dengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya, pada akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa juga dicantumkan NDRY KKURNIAWAN sebagai Komisaris dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 dan Agus Handoyo sebagai direktur dengan NPWP 45.508.047.3-411.00;

Pelaporan SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak (SSP)
PT>Virora Cipta Indonusa.

Masa Pajak	Pajak Keluaran (A)	Kredit Pajak		PPN (Lebih) Kurang Bayar (A)-(B) & (C)
		Pajak Masukan (B)	SSP (C)	
Juni	149.936.364	148.454.545	1.481.818	0
Juli	400.400.092	396.541.597	3.858.495	0
Agustus	0	0	6.487.977	0
September - Normal)	530.590.683	525.573.200	5.017.483	0
September - Pembetulan 1	593.362.270	587.389.100	955.687	0
Oktober - Normal *)	252.581.818	250.065.540	2.516.278	0
Oktober - Pembetulan 1	366.900.568	363.343.960	1.040.330	0
November - Normal)	117.672.727	116.672.727	1.166.727	0
November - Pembetulan 1	162.214.945	160.510.150	538.068	0
Desember	1.224.548.469	1.213.475.845	11.072.624	0
Jumlah	2.897.362.707	2.869.715.197	34.135.487	0

SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012

*)SPT normal tidak dijumlahkan.

Rincian Faktur Pajak yang digunakan (dikreditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut ;

Faktur Pajak yang Digunakan (dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta

Tahun	Pengguna/Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT.Unipalma	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
2012	PT.Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220
2012	PT.Sinar Pratama Agung	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT.Damarindo Mandiri	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
2012	PT.Multi Anugrah Cahaya	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT.Dextra Indo Buana	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
2012	PT.Mastrans Multi Artha	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonusa juga telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN Juni s.d. Desember 2012 dari PT. Petrosa Internasional, PT. Frymar Pratita Adung dan Pt. Purnama Sejati Utama sebesar Rp2.736.055.199,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp34.135.487,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan/Dikreditkan dan Dilaporkan dalam
SPT Masa PPN oleh PT.Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d.
Desember 2012

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT.Petrosa Internasional	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT.Frymar Pratita Agung	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT.Purnama Sejati Utama	01.702.640.2-008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2012:

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setor	NTPN
Juni	BNI KCU Rawamangun	02/08/2012	1.481.818	1306071311020200
Juli	BNI Capem Pondok Kelapa	03/09/2012	3.858.495	309120409031301
Agustus	BNI KCU Rawamangun	28/09/2012	6.487.977	1409000914001310
September	PT.Pos Indonesia	29/10/2012	5.017.483	813120909120111
September	BNI Capem Pondok Kelapa	30/10/2012	955.687	510030403150106
Oktober	PT.Pos Indonesia	28/11/2012	2.516.278	706071213020403
Oktober	BNI KCU Pasar mayestik	26/12/2012	1.040.330	1308061111091410
November	BNI KCU Pasar mayestik	26/12/2012	1.166.727	1012000704011000
November	BNI Capem Cipulir	31/01/2012	538.068	1511141115050500
Dseember	BNI KCU Pasar mayestik	21/01/2013	11.072.624	1514130311000400
	Jumlah		34.135.487	

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluhh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna/lawa transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Jauari s.d. Juli 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang

bersal dari PT. Virora Cipta Indonusa, serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang bersal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setora Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan (dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Januari s.d. Desember 2013

Tahun	Pengguna/Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT.Unipalma	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT.Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	5	12.994.897
2013	PT.Sarana Teknik Industri	02.311.016.6-048.000	11	14.952.800
2013	PT.Sarana Teknik Mekanika	03.089.749.0-032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setor	NTPN
Januari	BNI KCU Rawamangun	15/03/2013	20.840.612	808020000001310
Februari	B.Mandiri cab.Greenville	02/04/2013	18.774.712	202040608040413
Maret	BPD DKI Kebayoran Baru	29/04/2013	25.223.395	313100414060214
April	BNI KCU Rawamangun	28/05/2013	15.162.919	1403130203030800
Mei	BNI KCU Rawamangun	27/06/2013	17.157.148	1212000203070100
Juni	BNI KCU Tebet Jakarta	24/07/2013	12.888.582	800001410021000
	Jumlah		110.047.368	

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam

puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pajak Keluaran	Setoran Pajak	Kerugian Negara
2012	3.483.656.525	34.135.487	3.449.521.038
2013	14.623.332.086	110.047.368	14.558.493.375
Jumlah	18.106.332.086	114.182.855	17.962.805.756

Perbuatann Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nnomor 16 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PRIANGGOO alias ANDRY KURNIAWAN dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan yang mmenganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan juni 2012 sampai dengann bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajakk, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 adalah menjabat Komisaris bersama-sama dengann Sdr. Agus Handoyo sebagai direktur, akan tetapi dalam penidirian PT. Virora Cipta Indonusa yang disponsori oleh Sdr. Herry Prabowo, Terdakwa menggunakan identitas dengan nama ANDRY KURNIAWAN padahal nama sebenarnya Terdakwa adalah DJOKO PRIANGGONO, hal ini didasarkan pada tidak terdaftarnya NIK : 3674062402650004, tempat tanggal lahir : Bogor, 24-02-1960, adalah tidak benar karena NIK dan Nama tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, begitu juga dengan Agus Handoyo sebagai direktur yang sebenarnya memiliki nama Arifin, NIK : 3603250107600002, tempat tanggal lahir : Magelang, 01-07-1960, adalah tidak benar karena NIK dan Nama tidak ada di database SIAK Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Bahwa atas permintaan Sdr. Herry Prabowo Sd.r. Arifin untuk tanda tangan saja di Akta Pendirian Perusahaan Pti. Virora Cipta Indonusa yang dibuat pada Notaris Nurlaini Yusuf, S.H.M.Kn., dengan identitas bernama Agus Handoyo, yang juga dihadiri oleh Terdakwa selaku Komisaris. Setelah berdirinya PT. Virora Cipta Indonusa, lalu Terdakwa mendatangi KPP Pratama Kebun Jeruk Satu guna pendaftaran wajib pajak agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Penudaha Kena Pajak (PKP) dimana permohonan serta tanda

tangan dalam surat-surat permohonan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa pula lah yang menandatangani atas nama Direktur Agus Handoyo. Pada akhirnya keluarlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Virora Cipta Indonusa adalah 03.101.618.1-007.000 14 mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 29 Mei 2012. Dalam perjalanannya perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa tidak memiliki kegiatan usaha

Bahwa PT. Virora Cipta Indonusa yang didirikan oleh Terdakwa DJOKO PRIANGGONO dengan menggunakan identitas ANDRY KURNIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan rincian Faktur Pajak yang digunakan (direditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan (dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Pengguna/Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT.Unipalma	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
2012	PT.Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220
2012	PT.Sinar Pratama Agung	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT.Damarindo Mandiri	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
2012	PT.Multi Anugrah Cahaya	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT.Dextra Indo Buana	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
2012	PT.Mastrans Multi Artha	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonusa juga telah menggunakan/Mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT

Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. Petrosa Internasional, PT. Frymar Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama yang tidak berdasarkan transaksi yang sbenarnya sebesar Rp2.736.055.199,00 (dua miliar tujuh ratus tida puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp34.135.487,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan/Dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d.Desember 2012

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT.Petrosa Internasional	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT.Frymar Pratita Agung	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT.Purnama Sejati Utama	01.702.640.2-008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari penggunna/lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT. Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang bersal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari s.d April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan/Dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Januari s.d. Desember 2013 :

Tahun	Pengguna/Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT.Unipalma	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT.Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	5	12.994.897
2013	PT.Sarana Teknik Industri	02.311.016.6-048.000	11	14.952.800
2013	PT.Sarana Teknik Mekanika	03.089.749.0-032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Ibrahim sebagai Direktur PT. Petrosa Internasional, saksi M.Ridwan sebagai karyawan PT. Sarana Teknik Industri, saksi Sutarmanto dari PT. Uni Palma, menyatakan tidak pernah ada transaksi dengan PT. Virora Cipta Indonusa, sedangkan menyatakan saksi Zulkarnain sebagai Direktur PT. Damarindo Mandiri, Malfhy Ferdinan sebagai Direktur PT. Mega Cipta Bestaei, dan saksi Sony Salim dari PT. Sinar Pratama Agung, dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah bertransaksi dengan Terdakwa, sehingga faktur pajak yang digunakan adalah merupakan transaksi yang tidak sebenarnya.

Perbuatan Trdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Rpublik Indonesia Nomor 16 Tahunn 2009 jo Pasal 64 KUHP.

4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana *‘dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, da/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar dua kali Rp35.925.611.512,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) subsidair 6 (enam bulann penjara.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set ;

- 2) Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2 (dua) set;
- 3) Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) SPT Masa PPN normal dan pembetulan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
- 5) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1(satu) lembar;
- 6) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;

- 10) Foto copy Otentifikasi Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyeetoran saham ke dalam kas Perseroan;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hukum PT. Virora Cipta Indonusa;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor /1.824.1/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT. Virora Cipta Indonusa;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1/824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar Nomor; Pem01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.101.618.1-035.00 atas nama PT. Virora Cipa Indonusa;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama ANDRY KURNIAWAN ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama Agus Handoyo ;

- 19) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa;
- 20) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 21) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 22) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 23) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 24) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 25) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran

Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;

- 26) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran
Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;
- 27) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran
Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;
- 28) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut
lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat
Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;
- 29) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran
Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;
- 30) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa September 2012 berikut
lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat
Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;
- 31) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran

Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;

32) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran
Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;

33) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi
SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar
Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran
Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000;

34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan
Terdaftar atas nama PT. Uni Palma/NPWP
02.996.622.3-121.000 Nomor
Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 01
September 2009;

35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Uni
Palma/NPPKP 02.996.622.3-12.000 Nomor
Pem.946/WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober
2009;

36) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP atas
nama Sutarmanto sebagai Komisaris PT. Uni
Palma;

37) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.000000005 tanggal 30 Juni 2012
dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual
Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

38) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.000000009 tanggal 26 Juli 2012

dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

39) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

40) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

41) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

42) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

43) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

44) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 November 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan,

Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

45) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desember
2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

46) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desember
2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

47) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desember
2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma; kelalaian dalam penerapan hukum acara
atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

48) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

49) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

50) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,

Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

51) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

52) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

53) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

54) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

55) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,
Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT.
Uni Palma;

56) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak
Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret
2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan,

Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

57) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

58) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

59) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

60) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

61) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

62) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian

Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

- 63) 1 (satu) set Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlaini Yusup, S.H. (saat terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 64) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD Nomor S-01037210 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 65) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD Nomor S-01037211 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 66) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa September 2012 dengan LPAD Nomor S-01037543 tanggal 01 Oktober 2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 67) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD Nomor S-01042122 tanggal 01-11-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 68) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa November 2012 dengan LPAD Nomor S-01046448 tanggal 03 Desember 2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);

- 69) 1 (satu) set asli Permohonan Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian Formulir bertulis tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 70) 1 (lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor pem.01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima dan ditandatangani oleh ANDRY KURNIAWAN;
- 71) 1 (satu lembar asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 Mei 2012 dengan isian formulir bertulis tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 72) 1 (satu) set foto copy surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT. Virora Cipta Indonusa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, foto copy KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo;
- 73) 1 (satu) set asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
- 74) 1 (satu lembar asli Surat Keterangan Pindah Nomor Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu karena pindah kedudukan ke Jalan Sadar Raya Nomor 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data

dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tanda tangan Agus Handoyo;

- 75) 1 (satu) set asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan asli LPAD Nomor Pemm-01007188/017/Jun/2013 tanggal 05 Juni 2013 beserta foto copy surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 004-5/VCI-SK/IV/13 tanggal 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada DJOKO PRIANGGONO dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasa Minggu;
- 77) 1 (satu) set asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor ST-00332/WPJ.04/KP/1003?2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor 00356/WPJ.04/KP.10003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 81) 1 (satu) set asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor BA-00356/WPJ.04/KP.1003.2013

tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;

82) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no.S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2013;

83) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Permintaan Nomor Seri faktur Pajak Nomor 041/SP-PJ/VCI.IV/2013 tanggal 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;

84) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Pemberian Nomor Seri faktur Pajak Nomor S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari Agus Handoyo Kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;

85) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

86) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

87) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

- 88) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 89) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 90) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 91) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 92) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 93) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 atas nama Wiriadinata;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib pajak bertuliskan dan tandatangan atas nama Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata;
- 97) 6 (enam) lembar asli Biodata Penduduk Warga Indonesia NIK : 3276040905500001 atas nama DJOKO PRIANGGONO dan anggota keluarga yaitu : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 atas nama Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 atas nama Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 atas nama Adelya Fina Kuswardani;
- 98) 1 (satu) set asli Data Keluarga WnI atas nama Kepala Keluarga atas nama DJOKO PRIANGGONO serta bukti pendukung;
- 99) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat Nomor S-01035297/PPN1111?PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
- 100) 16 (enam belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN PPN Masa Januari 2013;

- 101) 15 (lima belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy ANDRY KURNIAWAN NIK : 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012;
- 104) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pendaftaran Wajib pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURIAWAN;
- 105) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN masa Januari 2013;
- 106) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN masa Februari 2013;
- 107) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi print out Profil Utama Badan (profil,akta, kewajiban, histori KPP, komisaris, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU);
- 108) 1 (satu set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 pada tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan 1 (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013);

109) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II;

110) 1 (datu set foto copy Otentifikasi SPT masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1;

111) 8 (delapan) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Masukan dari PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 010.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, 010.000.12.00000026 masa September 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRIANGGONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dari segala dakwaan tersebut.
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

- d. Membebankan biaya perkara pada Negara.

6. Alasan – Alasan Kasasi Penuntut Umum

Alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan bukan Terdakwa yang membuat KTP palsu (identitas dan data tidak benar) walaupun Terdakwa kemudian menggunakan KTP tersebut dan itu pun karena disuruh Herry Prabowo. Bukan Terdakwa juga yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan. Herry Prabowo pula yang menyuruh Terdakwa lakukan karena Terdakwa setiap bulan menerima uang dari Herry Prabowo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Menimbang bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengerti dan bisa berkomunikasi akan tetapi komunikasi itu berjalan tidak lancar karena Terdakwa masih bicara terbata-bata, bahkan suara nyaris tidak terdengar sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya;
- c. Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan *tempus delictie* perkara ini antara bulan Juni 2012 s.d. bulan Desember 2013, hal mana yang bersamaan waktunya dengan sakitnya Terdakwa (2012) dan Majelis berpendapat hal ini salah satu penyebab Terdakwa tidak sepenuhnya menyadari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu, selain juga karena disuruh

Herry Prabowo dengan “dibayar” Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- d. Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh *Judex Factie* tersebut adalah telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim tersebut seharusnya memperkuat kesalahan diri Terdakwa,. Sebab Terdakwa sangat menyadari perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah Herry Prabowo dengan menerima bayaran setiap bulan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Bahwa Terdakwa adalah selaku Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa sedangkan Direkturnya adalah Herry Prabowo (Terdakwa dalam perkara *splitzing*). Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama Herry Prabowo bukan mengatasnamakan pribadi melainkan atas nama perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa, sehingga kedudukan Terdakwa dan Herry Prabowo karena sebagai Direksi dan Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa;
- f. Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan perpajakan yang dilakukan PT. Virora Cipta Indonusa, bukan oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dikarenakan Terdakwa selaku Komisarisnya sangatlah menyadari akibat perbuatannya dan pertanggungjawaban hukum di perusahaan ada di tangan Terdakwa;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Terdakwa ketika di muka persidangan bicara terbata-bata sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di

persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru dikarenakan meskipun Terdakwa terganggu pendengarannya dan cara bicara, adalah bukan pertimbangan hukum yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena Terdakwa tergolong sebagai orang yang masih sehat jasmani dan rohani dalam kata lain Terdakwa adalah bukanlah orang yang sudah gila yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti surat menyeluruh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang kuat oleh *Judex Factie* bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dalam putusan *Judex Factie*. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melainkan Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak menerapkan

hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Factie* hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa

7. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan Kasasi dari Pemohon/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Factie* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaa. Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 Undang – Undang Perpajakan *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pidana denda sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan rtus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Factie* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Terungkap fakta di persidangan, awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat buruk/niat jahat untuk melakukan tuindak pidana perpajakan dengan modus operandi Terdakwa melakukan pemalsuan identitas di dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan menggunakan nama ANDRY KURNIAWAN dalam kedudukan selaku Komisaris.
- b. Bahwa Terdakwa selaku komisaris PT. Virora Cipta Indonusa dalam melakukan aksinya dengan cara Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa diganti namanya menjadi ANDRY

KURNIAWAN, sedangkan foto yang dipajang atau ditempelkan dalam KTP adalah foto wajah Terdakwa. Nama Terdakwa yang sebenarnya adalah DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN.

- c. Bahwa niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Agus Handoyo membuat perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan posisi/kedudukan Terdakwa selaku Komisaris. Namun Terdakwa dalam perusahaan menggunakan nama atau identitas yang dipalsukan.
- d. Bahwa Terdakwa kemudian mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mendapatkan NPWP dan PKP. Terdakwa kemudian membuat faktur pajak keluaran berdasarkan SPT masa PPN Juni – Desember 2012 dan SPT masa PPN dari Januari – Desember 2013 yang telah dipotong pajaknya oleh Terdakwa namun kenyataannya faktur pajak keluaran diterbitkan tidak atas dasar transaksi ekonomi, tidak berdasarkan aliran barang atau uang yang mendasari faktur pajak tersebut, tidak didukung transaksi usahanya. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* atas permintaan Sdr. Herry Prabowo saudara kandung Terdakwa.
- e. Bahwa keberadaan dan kegiatan usaha PT. Virora Cipta Indonusa sesungguhnya tidak ada/fiktif.
- f. Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Herry Prabowo saudara kandung Terdakwa, Sdr. Herry yang meminta Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*.
- g. Perbuatan Terdakwa yang membuat faktur pajak fiktif untuk dipergunakan perusahaan lain untuk mengurangi kewajiannya pajaknya secara hukum wajib bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara.

- h. Bahwa untuk tahun 2012 kerugian keuangan negara sebesar Rp3.449.521.938,00 sedang kerugian keuangan negara pada tahun 2013 sebesar Rp14.513.284.718,00 . Total kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan Kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

8. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti secara pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOO PRIANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) = Rp53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Akta Pendirian nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set ;
 - 2) Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2 (dua) set;
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4) SPT Masa PPN normal dan pembetulan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
 - 5) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 6) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor

- 010.000.12.00000030 tanggal 08 Oktober 2012
sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta
Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor
010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012
sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta
Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor
010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012
sebanyak 1 (satu) lembar;
- 10) Foto copy Otentifikasi Akta Pendirian PT. Virora
Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 Nomor 3
tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Surat Pernyataan
ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal
penyeetoran saham ke dalam kas Perseroan;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Keputusan
Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun
2012 perihal pengesahan badan hukum PT. Virora
Cipta Indonusa;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor
/1.824.1/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Agus
Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT. Virora Cipta
Indonusa;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili
Perusahaan Nomor 2612/1/824/1/12 tanggal 10 Mei
2012;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar
Nomor; Pem01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14
Mei 2012 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa;

- 16) 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.101.618.1-035.00 atas nama PT. Virora Cipa Indonusa;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama ANDRY KURNIAWAN ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama Agus Handoyo ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa;
- 20) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 21) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 22) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 23) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;

- 24) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 25) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 26) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 27) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 28) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 29) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;

- 30) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 31) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 32) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 33) 1 (satu) set 6 (enam) lembar foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 01 September 2009;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-12.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP atas nama Sutarmanto sebagai Komisaris PT. Uni Palma;

- 37) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 38) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 39) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 40) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 41) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 42) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 43) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 44) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 November 2012

- dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 45) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 46) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 47) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;
- 48) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 49) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 50) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 51) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013

- dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 52) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 53) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 54) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 55) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 56) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 57) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 58) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;

- 59) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 60) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 61) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 62) 5 (lembar) foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma;
- 63) 1 (satu) set Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlaini Yusup, S.H. (saat terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 64) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD Nomor S-01037210 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 65) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD Nomor S-01037211 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 66) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Julli 2012, Surat Setoran pajak Masa September 2012 dengan LPAD Nomor S-01037543 tanggal 01 Oktober

2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 67) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD Nomor S-01042122 tanggal 01-11-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 68) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran pajak Masa November 2012 dengan LPAD Nomor S-01046448 tanggal 03 Desember 2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 69) 1 (satu) set asli Permohonan Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian Formulir bertulis tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 70) 1 (lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor pem.01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima dan ditandatangani oleh ANDRY KURNIAWAN;
- 71) 1 (satu lembar asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 Mei 2012 dengan isian formulir bertulis tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu);
- 72) 1 (satu) set foto copy surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT. Virora Cipta Indonusa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, foto copy KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo;

- 73) 1 (satu) set asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pindah Nomor Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu karena pindah kedudukan ke Jalan Sadar Raya Nomor 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tanda tangan Agus Handoyo;
- 75) 1 (satu) set asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan asli LPAD Nomor Pemm-01007188/017/Jun/2013 tanggal 05 Juni 2013 beserta foto copy surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 004-5/VCI-SK/IV/13 tanggal 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada DJOKO PRIANGGONO dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 77) 1 (satu) set asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;

- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor ST-00332/WPJ.04/KP/1003?2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor 00356/WPJ.04/KP.10003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 81) 1 (satu) set asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor BA-00356/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no.S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2013;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Permintaan Nomor Seri faktur Pajak Nomor 041/SP-PJ/VCL.IV/2013 tanggal 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Pemberian Nomor Seri faktur Pajak Nomor S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari Agus Handoyo Kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 85) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 86) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

- 87) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 88) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 89) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 90) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 91) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 92) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 93) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasa Arus dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;

- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diteria dengan tanda terima oleh Kurniawan;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 atas nama Wiriadinata;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib pajak bertuliskan dan tandatangan atas nama Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata;
- 97) 6 (enam) lembar asli Biodata Penduduk Warga Indonesia NIK : 3276040905500001 atas nama DJOKO PRIANGGONO dan anggota keluarga yaitu : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 atas nama Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 atas nama Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 atas nama Adelya Fina Kuswardani;
- 98) 1 (satu) set asli Data Keluarga WnI atas nama Kepala Keluarga atas nama DJOKO PRIANGGONO serta bukti pendukung;
- 99) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat Nomor S-01035297/PPN1111?PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
- 100) 16 (enam belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
- 101) 15 (lima belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013;

- 102) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 02
Januari 2012 atas nama ANDRY KURNIAWAN
NPWP : 44.526.234.8-411.000;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy ANDRY KURNIAWAN
NIK : 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari
2012;
- 104) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pendaftaran Wajib
pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY
KURIAWAN;
- 105) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi Print Out SPT
Masa PPN masa Januari 2013;
- 106) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi Print Out SPT
Masa PPN masa Februari 2013;
- 107) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi print out Profil
Utama Badan (profil,akta, kewajiban, histori KPP,
komisaris, relasi tanpa NPWP, pemegang saham,
direksi, KLU);
- 108) 1 (satu set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN
masa November 2012 Normal (dengan Bukti
Penerimaan Surat S-
01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 pada
tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan 1 (dengan
Bukti Penerimaan Surat S-
01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 17
Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti
Penerimaan Surat S-
01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25
November 2013);
- 109) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN
Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan

Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II;

110) 1 (datu set foto copy Otentifikasi SPT masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1;

111) 8 (delapan) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Masukan dari PT. Virora Cipta Indonusa dengan Nomor Pajak 010.00000017, 010.000.12.00000020 , 010.000.12.00000021 , 010.000.12.00000025, 010.000.12.00000026 masa September 2012;

Terap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan *Judex Factie* Membebaskan Terdakwa Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Berdasarkan hasil pemaparan serta pokok masalah yang penulis teliti, penulis mengemukakan hasil penelian terkait alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena kesalahan *Judex Factie* membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang di sangkakan. Seperti yang tertulis dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP “jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka

Terdakwa di putus bebas”. Putusan bebas di dasarkan atas penilaian Hakim untuk menentukan apakah kesalahan dari Terdakwa sudah memenuhi unsur hukum pembuktian atau belum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim dapat menetapkan seseorang bebas dari segala putusan karena dari segi yuridis karena dari pebuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP terkandung dua asas mengenai pembuktian :

a. Asas minimum pembuktian

Asas bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah

b. Asas pembuktian secara negatif

Dalam undang – undang disebutkan asas pembuktian secara negatif yang menyebutkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan Terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan Terdakwa.

Putusan Hakim menggunakan Asas pembuktian secara negatif. Dimana Hakim memutuskan perkara tersebut dengan keyakinan Hakim terhadap pengakuan Terdakwa. Dengan adanya alat bukti dan keterangan saksi yang menurut Penuntut Umum itu cukup untuk mendukung dakwaanya. Namun dengan adanya asas ini dapat memperkuat apa yang diyakini Hakim tentang alat bukti tersebut dan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya. Atau

dapat dikatakan bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai dari pembuktian ini akan hilang tanpa adanya keyakinan Hakim.

Salah satu upaya yang dilakukan Penuntut Umum untuk memperkuat argumennya tentang perbuatan Terdakwa adalah dengan Kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa bila tidak menerima putusan Pengadilan di tingkat akhir. Alasan-alasan Kasasi dimuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang diantaranya apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah malampaui batas wewenangnya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Upaya Kasasi merupakan hak yang diberikan hukum terhadap Terdakwa atau Penuntut Umum. Dalam Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan Penuntut Umum. Mereka dapat menggunakan hak ini bila merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim maka mereka dapat mempergunakan hak ini untuk mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam pengaturan sebelumnya menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Pasal 244 KUHAP tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 244 KUHAP kini berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”. Hal tersebut berarti setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

- a. Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :
 - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
 - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
 - 3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
- b. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- c. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi

- d. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama
- e. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 253 telah jelas tentang hal yang perlu diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu, mengenai syarat formil permohonan Kasasi yang menyangkut syarat tenggang waktu pengajuan diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP berbunyi, “permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Selanjutnya, dalam Pasal 248 ayat (1) mengatur mengenai syarat formil pengajuan Kasasi yang berbunyi, “Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan Permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari

setelah mengajukan Permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Apabila terjadi keterlambatan melebihi waktu yang sudah ditentukan maka Hak pengajuan Kasasi akan dianggap gugur. Dalam kasus ini, dapat dinyatakan bahwa pengajuan Kasasi kasus ini memenuhi syarat formil dapat dilihat dari adanya pengajuan akta permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada 13 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2016. Membaca surat-surat yang bersangkutan. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 201, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang sehingga formal dapat diterima.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 253 telah jelas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi dapat diterima apabila telah memenuhi syarat formil terlebih dahulu sesuai dengan

ketentuan Pasal 248 KUHP. Kemudian, alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang tercantum “apakah benar suatu aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”

Berikut alasan Kasasi yang diajukan Penuntut umum dalam kasus tindak Pidana Perpajakan adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bukan Terdakwa yang membuat KTP palsu (identitas dan data tidak benar) walaupun Terdakwa kemudian menggunakan KTP tersebut dan itu pun karena disuruh Herry Prabowo. Bukan Terdakwa juga yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan. Herry Prabowo pula yang menyuruh Terdakwa lakukan karena Terdakwa setiap bulan menerima uang dari Herry Prabowo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengerti dan bisa berkomunikasi akan tetapi komunikasi itu berjalan tidak lancar karena Terdakwa masih bicara terbata-bata, bahkan suara nyaris tidak terdengar sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya.

Bahwa dalam surat dakwaan disebutkan *tempus delictie* perkara ini antara bulan Juni 2012 s.d. bulan Desember 2013, hal mana yang bersamaan waktunya dengan sakitnya Terdakwa (2012)

dan Majelis berpendapat hal ini salah satu penyebab Terdakwa tidak sepenuhnya menyadari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu, selain juga karena disuruh Herry Prabowo dengan “dibayar” Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh *Judex Factie* tersebut adalah telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim tersebut seharusnya memperkuat kesalahan diri Terdakwa. Sebab Terdakwa sangat menyadari perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah Herry Prabowo dengan menerima bayaran setiap bulan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa adalah selaku Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa sedangkan Direkturnya adalah Herry Prabowo (Terdakwa dalam perkara *splitzing*). Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama Herry Prabowo bukan mengatasnamakan pribadi melainkan atas nama perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa, sehingga kedudukan Terdakwa dan Herry Prabowo karena sebagai Direksi dan Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa.

Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan perpajakan yang dilakukan PT. Virora Cipta Indonusa, bukanlah oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dikarenakan Terdakwa selaku Komisarisnya sangatlah menyadari akibat perbuatannya dan pertanggungjawaban hukum di perusahaan ada di tangan Terdakwa

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Terdakwa ketika di muka persidangan bicara terbata-bata sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa

hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru dikarenakan meskipun Terdakwa terganggu pendengarannya dan cara bicara, adalah bukan pertimbangan hukum yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena Terdakwa tergolong sebagai orang yang masih sehat jasmani dan rohani dalam kata lain Terdakwa adalah bukanlah orang yang sudah gila yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana

Berdasarkan pemaparan hal di atas, penulis berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena *Judex Factie* mengabaikan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa terbukti bersalah. Sehingga dapat dijadikan alasan Kasasi oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tentang alasan Kasasi apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kesesuaian Pertimbangan *Judex Juris* Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Hakim dalam menjatuhkan Putusan haruslah didasari dengan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang teori dan praktek. Berdasar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak siapapun dalam proses persidangan, yang berarti bahwa pertimbangan dan penilaian Hakim tidak berat sebelah. Hakim dalam memberikan suatu keadilan haruslah melihat dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya lalu memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ada dua kategori untuk memberikan pengertian pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut (Rusli Muhammad, 2007: 212-221).

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya, Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang bukti, Pasal-pasal yang terkait. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan non-yuridis diantaranya, Latar belakang Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, Agama Terdakwa.

Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum (Rosadi : Badamai Law Journal, 2016).

Pembahasan rumusan masalah ke 2 tentang pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan pasal 255 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP seperti yang disampaikan rumusan 1 pada pada Pasal 255 ayat 1 KUHAP “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Berdasarkan tentang isi Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255”

Berdasarkan isi Pasal 193 KUHAP yang berbunyi “jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 bisa ditelaah apabila putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum secara semestinya, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi, membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika Terdakwa memang terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana.

Bahwa karena *Judex Factie* kurang dalam pertimbangannya maka alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat membebaskan Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa mengangkut melakukan pelaporan SPT palsu serta faktur pajak palsu yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian. *Judex Factie* kurang mempertimbangkan tentang keterangan Saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Bahwa Terdakwa telah memalsukan pelaporan SPT dan faktur pajak tahunan kepada KPP Pratama. Selain itu identitas yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah identitas palsu. Dimana tindakan tersebut telah melanggar Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau

pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2(dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dilakukan”.

Bahwa dalam proses persidangan terdapat banyak alat bukti dan adanya keterangan saksi yang memberikan petunjuk akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu saat proses persidangan secara tidak sengaja Terdakwa mengakui dan mengerti tanggung jawab yang harus dia perbuat karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 819/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut, Keadaan-keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara. Selain itu terdapat Keadaan yang meringankan, Terdakwa telah berusia lanjut, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur seberat atau ringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak

akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Hakim, maka terlebih dahulu Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kumpulan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Jika memang Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berimplikasi jika Terdakwa memang terbukti bersalah maka dia patut untuk menjatuhkan Pidana.

Pemeriksaan perkara oleh Hakim harus bersifat terbuka. Hakim dalam menentukan penilaian atas pembuktian serta menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penilaian terhadap argumentasi para pemohon Kasasi setelah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil permohonan Kasasi, sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mendasarkan pada pasal 255 ayat 1 KUHAP maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, penulis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum atau tidak ditetapkan sebagaimana mestinya, dalam kasus ini juga terjadi kegagalan dimana Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya melihat dari segi pengakuan Terdakwa dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala Dakwaan yang disangkakan kepadanya oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum merasa keberatan karena terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat sehingga diajukan Kasasi oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat suatu hal yang memberatkan Terdakwa yaitu adalah Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara. Karena dengan jelas Terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan pelaporan SPT dan faktur pajak yang digunakan untuk keuntungannya sendiri. Selain itu Terdakwa juga secara tidak langsung mengakui perbuatannya tersebut dan mengerti akan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Perbuatan terdakwa juga seperti yang diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pegusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau

kompensasi yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dilakukan”.

Mahkamah Agung menilai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP . Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan Terdakwa bersalah karena Terdakwa telah Terbukti melanggar Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009. Maka dari itu pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP di mana saat Terdakwa terbukti bersalah maka harus dikenakan pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perpajakan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2628 K/Pid.Sus/2016 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena *Judex Factie* mengabaikan Hukum Pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukann tindak pidana di bidang perpajakan. Sehingga kesalahan *Judex Factie* dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tentang alasan Kasasi “apakah benar suatu hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”
2. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan

Kuasa Hukum Terdakwa, pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah telah sesuai dengan aspek Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung mengabulkann Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Jakrta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, Mahkamah Agung mengadili sendiri Perkara tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan dan Menjatuhkan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan Pidana Denda dan denda sebesar tiga kali Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) = Rp53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) subsidair 8 bulan. Keputusan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhkan pidana. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undanng Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan *jo* Pasal 64 KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya lebih memperhatikan dan memahami isi Undang-Undang agar penerapan peraturan hukum tidak salah atau peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya sehingga tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

2. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hendaknya dalam membuat keputusan lebih jeli dan teliti dalam menilai alat bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung : MandarMaju
- Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Alwi dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Makaraao, Mohammad Taufik dan Suhasri. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalila Indonesia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

-----2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak* . Bandung : Salemba Empat

Jurnal

Kusuma, Diajeng Ningrum , “Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara” *Jurnal Law Reform* tahun 2016

Rosadi, “Verdict of Jutice” *Badamai Law Journal* tahun 2016

Safitri Ria, “penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN)”(studi pada polda lampung) tahun 2015

Suisno, “peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana”, *Journal Independent* tahun 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke - 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan